



RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

KOTA BEKASI TAHUN

2017



DISKOMINFOSANDI

KOTA BEKASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Adalah merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu di perlukan suatu strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Kota Bekasi sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai E-Government. Tantangan besar dalam implementasi E- Government terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus focus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik serta Persandian (DISKOMINFOSTANDI) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, yaitu "**Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan**", DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Tahun 2017-2018 yaitu "**Kota Bekasi yang Informatif, Kreatif, Akuntabel Berbasis**

Teknologi Informasi”. Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan E_Government;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana Teknologi dan Informasi.
3. Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi kepada Masyarakat serta Promosi Potensi Daerah;

Rencana Kerja (Renja) DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Tahun 2017 adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra DISKOMINFOSTANDI Tahun 2017-2018 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Tahun 2017 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi tahun 2017, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 / PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota/Kota;
 28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 24 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat;
 30. Peraturan Daerah Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 10 Desember 2013 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
 32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2005-2025;
 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2013-2018;
36. Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
37. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta Statistik dan Persandian.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja DISKOMINFOSTANDI Tahun 2017 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

Tujuan penyusunan Renja DISKOMINFOSTANDI Tahun 2017 adalah sebagai acuan DISKOMINFOSTANDI dalam mengoperasionalkan RKPd Kota Bekasi Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kota Bekasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Substansi Rancangan Renja DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Tahun

2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; serta program dan kegiatan.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi;

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi belum mempunyai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)*

Nama PD : DISKOMINFOSTANDISTANDI

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015 (n-2)			Target program dan kegiatan 2016 (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan 2016	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2018 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014 (n-3)	Target Renja PD tahun 2015 (n-2)	Realisasi Renja PD 2015 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2016 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor								
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Sarana Komunikasi, Listrik dan Air	6 Jenis Tagihan	-	-	-	-	-	-	-

1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor Pada Diskominfo standi Kota Bekasi Sesuai Kebutuhan	63 jenis	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 jenis	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	7000 eks koran, 12majalah dan 25 buku	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	1365 box	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya Perjalanan Dinas	220 HOK	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa piket sandi dan telekomunikasi	1640 HOK	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Penataan Arsip	Pengarsipan dilingkungan diskominfo	1 SKPD	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
Tahun 2017

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	-	-	-	-
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	280 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	86 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	40 unit	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya perlengkapan mebelair	151 Unit	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara		-	-	-	-	-	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Disiplin Aparatur Negara	85 stel	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
Tahun 2017

3.2	Pengadaan Pakaian Hari-hari	Terpenuhinya sarana dan prasarana pakaian pegawai	85 stel							
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam pendidikan	60 orang	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD		-		-	-	-		
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LPPD, LKPJ, evaluasi Kinerja	30 buku 1 dokumen	-		-	-	-		
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan	tersusunnya buku laporan keuangan tahunan dinas sebagai laporan pertanggung jawaban	14 buku	-	-	-	-	-	-	-

6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Prosentase Pencapaian Road Map E-Government	100%	-		-	-	-		
6.1	Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi	Jumlah Titik Jaringan	825 titik	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi	Terbangunnya Jaringan TIK	4 SKPD	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Pengadaan Perangkat VoIP	Tersedianya perangkat ip-phone	100 unit	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi	Terbangunnya Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi	1 Titik							
6.5	Pembangunan Jaringan Fiber Optik	Terbangunnya Jaringan Fiber Optik di Kota Bekasi	107 kilo meter							
6.6	Penyusunan DED jaringan FO	Tersedianya dokumen DED 56 kelurahan	1 dokumen							
6.7	Penyusunan SOP pengelolaan TIK dan aplikasi E-Govt	tersedianya SOP Pengelolaan TIK dan aplikasi E_GOV	15 sop							
6.8	Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi	Pemeliharaan Infrastruktur Data Centre	1 Lokasi, 4 orang, 1 data centre, 6 bulan	-	-	-	-	-	-	-

6.9	Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi	Jumlah Titik yang tersambung dengan layanan cloud	1 layanan, 1 unit, 1 buku	-	-	-	-	-	-	-
6.10	Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	Terkelolanya Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah bekasi dan ruang publik	300 Titik AP, 12 bulan, 10 AP	-	-	-	-	-	-	-
6.11	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terkelolanya Keamanan Informasi sesuai Standar ISO 27001:2013	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-
6.12	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Pengunjung website	295.000 pengunjung	-	-	-	-	-	-	-
6.13	Pemeliharaan dan pengelolaan Layanan Informasi digital Kecamatan	Terpelihara dan terkelolanya Layanan Informasi digital Kecamatan	12 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
6.14	Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi	Terkendalikannya Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi	113 SKPD dan Unit Kerja	-	-	-	-	-	-	-
6.15	Pengelolaan Aplikasi Perizinan E-PATEN website Kecamatan dan kelurahan	pemeliharaan Aplikasi E-PATEN dan website 12 kecamatan dan kelurahan	12 Kec. Dan 56 Kel.	-	-	-	-	-	-	-
6.16	Pengendalian E Government Pemerintah Kota Bekasi	Terkendalikannya pengembangan E Government Pemerintah Kota Bekasi	46 SKPD	-	-	-	-	-	-	-
6.17	Decision Support System analitik	Terbangunnya Decision Support System Analitik	2 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-

6.18	Penyusunan standar format metadata (IT Library) SIM/Layanan Berbasis E Gov	Tersusnya standar format metadata (IT Library) SIM/Layanan Berbasis E Gov	1 Dokumen Standarisasi	-	-	-	-	-	-	-
6.19	Pemetaan Application Programe Interface (API) dan ekosistem interoperabilitas sistem informasi dan layanan berbasis E- Gov Kota Bekasi	pemetaan Application Programe Interface (API) dan ekosistem interoperabilitas Sistem Informasi dan Layanan Berbasis E gov sebagai Design Government Bus System Kota Bekasi	2 Dokumen Pemetaan	-	-	-	-	-	-	-
6.20	Pengelolaan Workshop TIK Kota Bekasi	Jumlah Pengunjung Workshop TIK Kota Bekasi	200 pengguna							
6.21	Penerapan E Office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi	Diterapkannya E Office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi	16 SKPD	-		-	-	-		
6.22	Pengelolaan LPSE	Jumlah paket yang terlayani SPSE Kota Bekasi	2251 paket	-	-	-	-	-	-	-
6.23	Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE	Optimalnya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	20 Perangkat	-		-	-	-		
6.24	Pengembangan Integrated Waste Management Information System (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi) Kota Bekasi	Implementasi manajemen pengelolaan persampahan melalui Sistem Informasi yang terintegrasi mulai dari sumber hingga akhir (memadukan berbagai elemen kota seperti kewilayahan, ruas jalan, kemacetan, kepadatan penduduk, tata kelola pengangkutan) dan	1 aplikasi perangkat penunjang	-		-	-	-		

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
Tahun 2017

6.25	Manajemen Integrasi Data	Terintegrasinya Database	15 database	-	-	-	-	-	-	-
6.26	Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi	Terpeliharanya aplikasi POT yang terintegrasi dengan Sorot	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
6.27	Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD, DISNAKER DAN SETWAN	Pemeliharaan dan Penataan Jaringan TIK Kota Bekasi	4 SKPD	-	-	-	-	-	-	-
6.28	Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center	Terpelihara dan terkelolanya Patriot Operation Center	1 lokasi	-	-	-	-	-	-	-
6.29	Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City	Rencana Aksi pengembangan smart city implementasi e health dan e education kawasan, Deteksi dini Banjir dan pengelolaan sampah terintegrasi di kawasan	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
6.30	Implementasi Kawasan Smart City	Terlaksananya Pilot Project Implementasi Kawasan Smart City	10 aplikasi dan Smart device	-	-	-	-	-	-	-
6.31	Pelaporan dan Kliping berita online dan cetak	tesedianyan pelaporan media cetak dan online	12 laporan	-	-	-	-	-	-	-

6.32	pengelolaan alat persandian	Tersedianya Alat Pendukung Utama Operasional Persandian	1 unit							
6.33	Penguatan Operator Transmisi Sandi (OTS)	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Operator transmisi Sandi	60 orang							
6.33	Pelatihan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik pemerintah	Sterilnya Ruang Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Kepala Perangkat Daerah	50 ruangan							
6.34	Pembangunan Aplikasi Analisis Opini Publik	Terbangunnya Aplikasi Analisis Opini Publik	1 Aplikasi							
7	Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	Prosentase Tersedianya Pelayanan Informasi	90%							
7.1	Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Operator Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi	Terselenggaranya peralatan telekomunikasi penunjang telekomunikasi yang memadai sesuai kebutuhan kegiatan operasional di lapangan	8 jenis Alat							
7.2	Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi	Tersedianya Laporan Akhir Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagai dasar pemungutan retribusi	1 dokumen							

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
Tahun 2017

7.3	Pengadaan peralatan pengawasan menara telekomunikasi serta instrumen pendukung radio frekuensi dan telekomunikasi	"tersedianya peralatan yang akan menunjang kinerja personil di lapangan dalam rangka kegiatan pengawasan menara telekomunikasi serta Instrumen Pendukung Frekuensi dan Telekomunikasi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Rencana Induk jaringan telekomunikasi kota Bekasi	memberikan suatu pusat data terutama sistem informasi terpadu perencanaan menara BTS yang mempermudah serta memberikan data yang sistematis 1 laporan CD data base, Soft Ware Cell Plan	Raperwal Rencana Induk telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-
				-		-	-	-		
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan	100 %	-		-	-	-		
8.1	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Melalui media elektronik, radio dan media antar ruang	Tersebaranya Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Melalui Multi Media (media massa 12 x, media interpersonal 12x, media online 365 x)	-	-	-	-	-	-	-

8.2	Penyusunan profil Kota Bekasi	jumlah buku profil Kota Bekasi	1000 buku	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Pembinaan KIM Kota Bekasi	Terbinanya KIM Kota Bekasi	12 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Pembinaan admin medsos SKPD	jumlah kegiatan penyebarluasan informasi publik yang menggunakan media alternatif	3 FGD	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Pembinaan komunitas film dan photography	jumlah fasilitasi kegiatan penunjang publikasi Pemkot	1 film & Foto dokumenter	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Peningkatan kapasitas ruang layanan PPID	tersedianya sarana prasarana PPID	1 Paket							
8.7	Pembinaan PPID pembantu	jumlah PPID pembantu yang terbina	70 orang							
8.8	Pengelolaan media online dan medsos	terkelolanya media online dan medsos secara rutin	media online 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-

9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	IKM mengenai pelayanan prima kehumasan SKPD pemkot bekasi	100%	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Pembuatan aplikasi SIM PPID	tersedianya fasilitas penunjang PPID	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Bimbingan Teknis Jurnalistik Aparat	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Kursus Jurnalistik Aparat	49 Orang	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017	Pengelolaan, Penataan dan Sarana pendukung Media Centre dan Kliping Surat Kabar	1tahun, pengelolaan Media centre, 2 komputer, 2 printer, 2 Meja komputer dan 110 buku kliping							
9.4	Festival seni pertunjukan tradisional	jumlah kegiatan penyebarluasan informasi publik yang menggunakan media alternatif	1 keg							
9.5	Pembuatan jingle iklan dan mars Kota Bekasi	tersedianya sarana publikasi format alternatif	1 Jingle, 1 mars							
9.6	Fasilitasi publikasi sektoral melalui multimedia	tersedianya iklan layanan masyarakat	5 ILM							
9.7	literasi media ke masyarakat	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	60 orang	-	-	-	-	-	-	-

9.8	kemitraan kehumasan	Terlaksananya kegiatan Bakohumas Nasional, kegiatan Bakohumas Regional Terlaksananya kegiatan Pekan Informasi Nasional Terlaksananya pelatihan kehumasan	4 Keg, 1 Keg, 1 Keg, 1 Kali	-	-	-	-	-	-	-
9.9	Pembuatan film dokumenter hasil pembangunan Kota Bekasi	tersedianya dokumentasi pembangunan kota dalam format film	1 film dokumenter	-	-	-	-	-	-	-
9.10	Pameran karya jurnalistik komunitas	jumlah fasilitas aktivitas masyarakat jadi menunjang publikasi Pemkot	1x pameran	-	-	-	-	-	-	-
9.11	Studi kelayakan pengembangan stasiun radio dan TV lokal	tersedianya dokumen studi mengenai radio/TV	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
9.12	Sosialisasi Publikasi Pemilu	Tersedianya informasi tentang pelaksanaan pemilu	18 buah spanduk, 12 kali talkshow radio, 1 kali advertorial, 60 kali spot ilm radio, 1 live event radio, 180 buah foto, 2 buah album, 1000 buah stiker, 100 buah brosur, 3 buah baliho							
9.13	Bimbingan Teknis Design Komunikasi Visual	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Design Komunikasi Visual	20 Orang							
9.14	Sosialisasi SOP Pengaduan Online	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Sosialisasi SOP	49 Orang							

9.15	Pengembangan komunitas jurnalistik	jumlah aktivitas komunitas dalam mendukung publikasi pembangunan	FGD 3 kali	-	-	-	-	-	-	-
9.16	Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan	Terselenggaranya pelatihan Citizen Journalism	1 Kali	-	-	-	-	-	-	-
9.17	Penguatan Fungsi PPID	Terlaksananya koordinasi Tersedianya buku hasil sengketa informasi	44 SKPD 1 laporan buku tahunan	-	-	-	-	-	-	-
9.18	Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Aparatur SKPD	Jumlah Aparatur SKPD yang dilatih		-	-	-	-	-	-	-
9.19	Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku	Tersedianya majalah Kota Bekasi	3.978 eksemplar							
9.20	Pembuatan aplikasi penilaian sentimen publik	tersedianya fasilitas penunjang pengelolaan opini dan aspirasi publik	1 aplikasi							
9.21	Studi tingkat kepuasan masyarakat terhadap media pengaduan online	tersedianya dokumen analisa media online	1 Dokumen							
9.22	Studi tingkat kepuasan masyarakat terhadap media pengaduan online	tersedianya dokumen analisa media online	1 Dokumen							

9.23	Jajak pendapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	tersedianya dokumen penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
9.24	Pembinaan Kehumasan	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti pembinaan	- 100 anggota bakohumasda, 1 keg pekan informasi nasional, 1 keg bakohumas regional, 1 keg bakohumas nasional	-	-	-	-	-	-	-
9.25	Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers	Tingkat penguasaan pengetahuan SDM bidang kehumasan	- 33 pelatihan kehumasan, 24 x forum tatap muka, 5 x lomba jurnalistik, 5 x study komparatif	-	-	-	-	-	-	-
9.26	Kursus Singkat Kehumasan	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Kursus Kehumasan	20 Orang	-	-	-	-	-	-	-
9.27	Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi dan Telepon	Tersedianya jaringan telepon Tersedianya faksimili	30 Unit							
9.28	Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi	Tersedianya DED Jaringan Menara Telekomunikasi dan Pergelaran FO (Fiber Optik) di Kota Bekasi	1 Dokumen							
9.29	Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan	Tersedianya menara repeater, Tersedianya Radio Repeater dan peralatan	1 unit							

10	Program Pengembangan Data dan Informasi	Presentase jumlah data sekunder yang tervalidasi dan terbaru	50%	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaru	80%	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Pengelolaan sistem open data kota bekasi	Tersedianya sistem aplikasi open datai	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Penyusunan PDRB dan analisis potensi ekonomi	Tersedianya Buku PDRB	100 buku	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Penyusunan Buku Statistik Indikator Makro Kota Bekasi	Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro Kota Bekasi	100 buku	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Pengeloaan statistik sektoral berbasis WEB GIS City	Tersedianya data statistik sektoral berbasis WEB GIS City	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
Tahun 2017

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi, pelayanan Pos dan Telekomunikasi serta telematika dan Pengelolaan Data Elektronik, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta Statistik dan Persandian.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik serta Persandian Kota Bekasi Kepala Dinas mempunyai tugas tugas pokok mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian untuk mencapai visi dan misi Dinas.

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

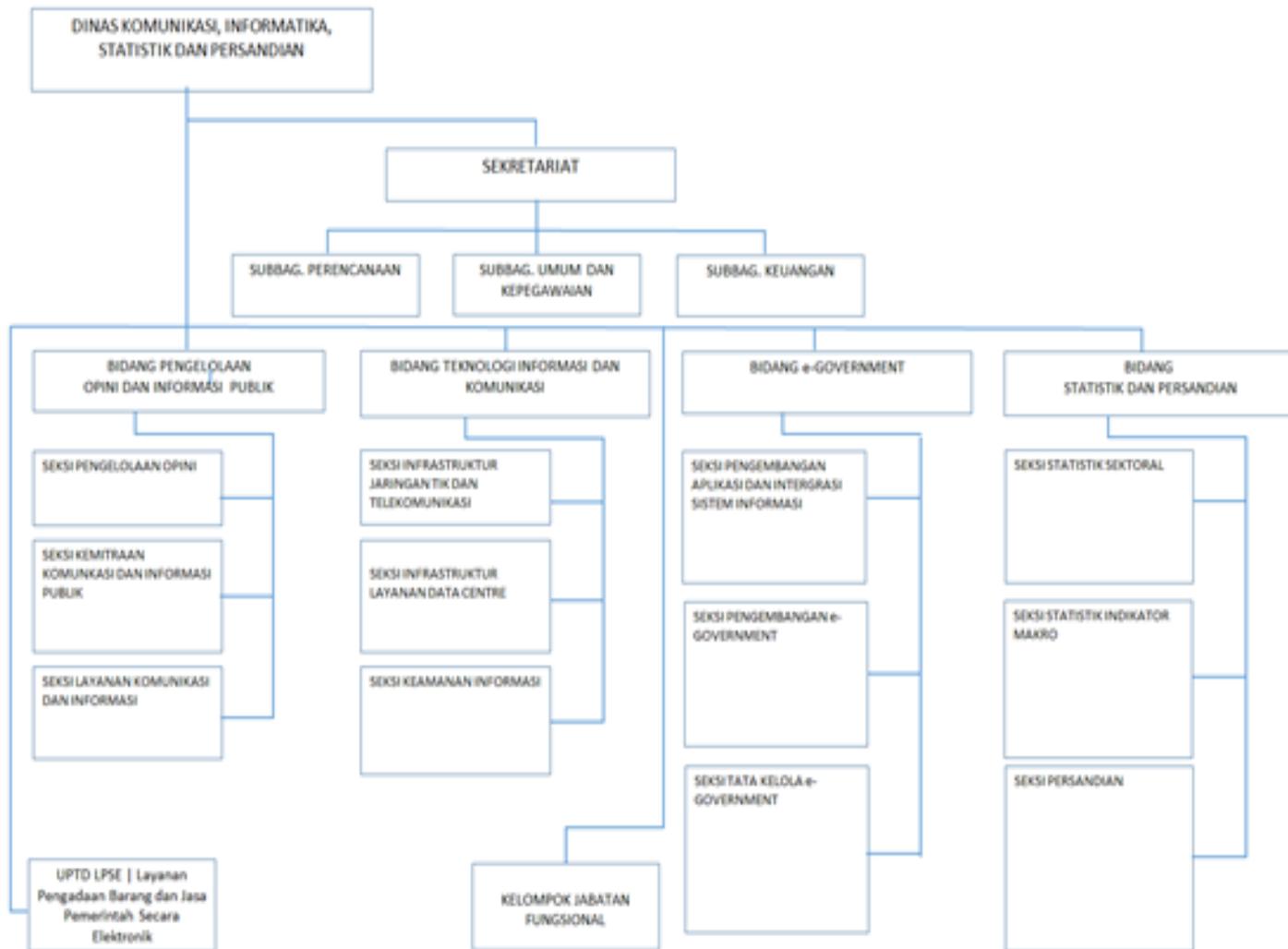
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
 - b. menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
 - c. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
 - d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian;
 - f. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian;
 - g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
 - i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - j. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
 - k. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan PD kepada PD terkait/Kormonev;
 - l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada PD terkait;
 - m. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
 - n. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;

- o. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- p. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- q. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang meliputi pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian;
- r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kota/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian sesuai kebijakan Wali Kota;
- s. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- t. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- x. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan PD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DISKOMINFOSTANDI adalah urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik;
 3. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Infrastruktur Layanan Data *Centre*;
 3. Seksi Keamanan Informasi.
 - e. Bidang e-Government, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengembangan e-Government;
 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
 - f. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
 1. Seksi Statistik Sektoral;
 2. Seksi Statistik Indikator Makro;
 3. Seksi Persandian.
 - g. UPTD LPSE;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2016 sebagai berikut:



Keadaan Pegawai DISKOMINFOSTANDISTANDI Bekasi berdasarkan jumlah pada bulan Januari 2017:

No	Status	Jumlah
1	PNS	51
2	CPNS	-
3	TKK	20
4	Sukwan	-
Jumlah		71

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DISKOMINFOSTANDISTANDI Kota Bekasi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional											
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;		12 x /tahun										
	b. Media baru seperti website (media online);		Setiap hari										
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;		12 x /tahun										
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;		12 x /tahun setiap kecamatan										
	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho		12 x /tahun										

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-1)	Tahun 2016 (tnn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-1)	Tahun 2016 (tnn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	50 %									

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
Tahun 2017

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan peran DISKOMINFOSTANDISTANDI sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi, Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar PD atau e- government yang telah terpasang.
2. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Masih adanya beberapa wilayah diKota Bekasi yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
4. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
5. Belum Terbentuknya KIM.
6. Belum terbentuknya Badan Hukum pada Radio Kota Bekasi sebagai LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DISKOMINFOSTANDISTANDI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi
- b) Peningkatan peranan pos dan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama

dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi

- c) Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan
- d) Perbaiki sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bekasi, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dengan tema “ Peningkatan Infrastruktur Dasar, Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bermartabat”. Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi dalam pengelolaan Komunikasi dan Informasi serta tugas lain bidang Pemerintahan telah disusun rencana program kegiatan tahun 2017 yang terdiri dari 9 program dan 42 kegiatan.

Rencana program dan kegiatan DISKOMINFOSTANDI yang terdapat pada RKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3

TABEL2.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

No	Program	Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Alat Tulis Kantor
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5		Penyediaan Makanan dan Minuman
6		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
8		Penataan Arsip
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2		Pengadaan Meubelair
3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1		Pengadaan Pakaian Olahraga
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Penyusunan Laporan Keuangan
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal
VI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
1		Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi
2		Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi
3		Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD, DISNAKER dan SETWAN
4		Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi

5		Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center
6		Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi
7		Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi
8		Pengelolaan Hotspot Area di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik
9		Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
10		Pengelolaan LPSE
11		Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Digital Kecamatan
12		Manajemen Intergrasi Data
13		Penerapan e-office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi
14		Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City
VII	Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	
1		Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Operator Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi
2		Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi

VIII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
1		Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi dan Telepon
2		Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi
3		Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan Kota Bekasi
4		Sosialisasi Publikasi Pemilu
5		Penguatan Fungsi PPID
6		Pembinaan Kehumasan
7		Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan
8		Penerbitan Majalah Kota Bekasi
9		Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017
IX	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	
1		Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Techno Economy, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik- baiknya, oleh karena itu pemerintah Kota Bekasi berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFOSTANDI yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra DISKOMINFOSTANDI, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja DISKOMINFOSTANDI Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui penerapan e_government

Misi 2 : Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat serta promosi potensi daerah

Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana Teknologi dan Informasi

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan TIK	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK dan Pusat Data
2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan e government untuk perluasan aksesibilitas informasi dan layanan publik;	Terwujudnya integrasi berbasis e government dalam menunjang Pelayanan Informasi
3	Meningkatnya kualitas isi informasi	Terwujudnya isi Informasi yang berkualitas
4	Meningkatnya volume diseminasi dan distribusi informasi	Terwujudnya peningkatan kuantitas penyebaran informasi
5	Meningkatnya partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat	Terwujudnya peningkatan partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat
6	Meningkatnya kualitas SDM (pranata kehumasan dan arsiparis)	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM
7	Meningkatnya kualitas layanan publik Pemerintah melalui fasilitasi pertimbangan teknis pembangunan manara telekomunikasi	Terselenggaranya fasilitasi pertimbangan teknis (koordinat penempatan) pembangunan manara telekomunikasi
8	ketersediaan data statistik di kota bekasi	Terwujudnya sarana prasarana yang terintegrasi

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan DISKOMINFOSTANDI tahun 2017 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra DISKOMINFOSTANDI tahun 2017-2018 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017, berdasarkan Renstra DISKOMINFOSTANDI tahun 2013-2018, program dan kegiatan indikatif DISKOMINFOSTANDI pada tahun 2017 dijabarkan menurut 4 (empat) misi DISKOMINFOSTANDI. Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 dituangkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KOTA BEKASI

NAMA PD : DISKOMINFOSTANDI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3									
3	36			Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan					
3	36	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor	100%		
3	36	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya Kebutuhan Sarana Komunikasi, Listrik dan Air	11 bulan sewa internet, 12 rek/bln tlpn/fax, 12 bulan frekuensi, 11 bulan tv kabel	2.077.800.000	Pendapatan Daerah
3	36	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis kantor Pada Diskominfo standi Kota Bekasi Sesuai Kebutuhan	63 jenis	100.000.000	Pendapatan Daerah

3	36	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 jenis	80.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Tersedia Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5400 ekp koran, 12 majalah dan 25 buku	30.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman	1050 box	100.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	169 HOK	205.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	27	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Tersedianya jasa piket sandi dan telekomunikasi	1262 HOK	101.900.000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	31	Penataan Arsip	SKPD	Pengarsipan dilingkungan diskominfo	1 SKPD	45.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%					
3	36	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	35 unit	200.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	2	10	Pengadaan Meubelair	SKPD	Terpenuhinya perlengkapan mebelair	151 unit	195.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	216 kali pemeliharaan	210.000.000	Pendapatan Daerah			

3	36	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	86 unit	35.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara	100%					
3	36	3	6	Pengadaan Pakaian Olahraga	SKPD	Pengadaan Pakaian Olah Raga	75 stel	70.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	100%					
3	36	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 buku renstra, 10 buku renja, 10 buku renja, 1 dokumen analisis jabatan	66.500.000	Pendapatan Daerah			
3	36	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan	SKPD	tersusunya buku laporan keuangan tahunan dinas sebagai laporan pertanggung jawaban	35 buku	60.000.000	Pendapatan Daerah			
3	36	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur Diskominfostandi	100%					

3	36	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Terlaksananya keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam pendidikan	54 orang	40.000.000	Pendapatan Daerah			
4												
4	16			Komunikasi dan Informatika								
4	16	18		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Prosentase Pencapaian Road Map E-Government	95%					
4	16	18	1	Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi	Kota	Jumlah Titik Jaringan	1 dokumen laporan (12 bulan), 800 titik	651.638.000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	10	Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi	SKPD	Terpeliharanya aplikasi POT yang terintegrasi dengan Sorot	1 aplikasi POT, 1 video pembuatan motioggraphihc POT	200.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	11	Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD, DISNAKER dan SETWAN	SKPD	Pemeliharaan dan Penataan Jaringan TIK Kota Bekasi	4 SKPD (Setda, BPKAD, Disnaker, Setwan)	300.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	12	Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi	Kota	Terkendalikannya Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi	1 event lomba aplikasi, 9 aplikasi e-govt, 1 dokumen hasil pengendalian penerapan TIK	650.000.000	Pendapatan Daerah			

4	16	18	13	Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center	SKPD()	Terpelihara dan terkelolanya Patriot Operation Center	1 lokasi POC, 1 aplikasi dashboard smart system platform, 1 paket jaringan cctv & wifi di ruang publik, 1 unit server	500.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	2	Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi	SKPD	Pemeliharaan Infrastruktur Data Centre, Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data Centre, Pengelola Perangkat Data Centre, Penempatan Disaster Recovery Centre (DRC) Server SKPD	1 Data Center pemeliharaan infrastruktur, 4 orang peningkatan kapasitas SDM, 1 data center, 6 bulan penempatan (DRC)	500.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	3	Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi	Kota	Terbangunnya Jaringan TIK	1 SKPD, 1 bak control grounding	200.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	4	Pengelolaan Hotspot Area di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	Kota	Terkelolanya Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah bekasi dan ruang publik, Monitoring dan report wifi di lingk. Pemkot bekasi dan ruang publik, pengadaan Acces Point	65 titik AP, 12 monitoring dan report wifi di lingkungan pemkot, 10 pengadaan Acces point	400.000.000	Pendapatan Daerah			

4	16	18	5	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi	SKPD	Pemeliharaan pengadaan perangkat, pengembangan, publikasi, peliputan, updating konten, sewa bandwidth/hosting, peningkatan kapasitas SDM TIK 285.000 pengunjung website	1 website bekasikota.go.id, 12 website kecamatan, 6 unit peralatan penunjang website, 1 website diskominfosatndi, 1 aplikasi sentimen medsos twitter	400.000.000	Pendapatan Daerah		0 pengunjung website	0
4	16	18	6	Pengelolaan LPSE	SKPD	Jumlah paket yang terlayani SPSE Kota Bekasi,	1.301 paket yang terlayani LPSE, 1x generator listrik, 17 standarisasi LPSE, 144 bimtek ppk, 125 bimtek rup, 12 bulan drc, 12 unit perangkat komputer, 12 unit UPS, 1 standar iso 9001, 1 paket server, 6 unit perangkat penunjang LPSE	1.450.000.000	Pendapatan Daerah		0 paket, 17 standar	0
4	16	18	7	Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Digital Kecamatan	Kota	Terpelihara dan terkelolanya Layanan Informasi digital Kecamatan	12 kecamatan, 80 orang bimtek	200.000.000	Pendapatan Daerah			

4	16	18	8	Manajemen Intergrasi Data	SKPD	Terintegrasinya Database	5 database terintegrasinya data pemerintah kota bekasi	200.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	9	Penerapan e-office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi	SKPD	Diterapkannya E Office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi	6 SKPD penerapan e-office, 15 unit peralatan penunjang e-office	200.000.000	Pendapatan Daerah			
				Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City	SKPD	Rencana Aksi pengembangan smart city implementasi e health dan e education kawasan, Deteksi dini Banjir dan pengelolaan sampah terintegrasi di kawasan	1 kajian pengembangan kawasan, 3 aplikasi implementasi kawasan smart city, 3 unit smart device, 2 unit digital media information, 1 unit server	1.000.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	17		Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi		Prosentase Tersedianya Pelayanan Informasi	82%					
4	16	17	1	Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Operator Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi	Kota	Terselenggaranya peralatan telekomunikasi penunjang telekomunikasi yang hnadal sesuai kebutuhan kegiatan operasional di lapangan	8 jenis alat penunjang telekomunikasi	100.000.000	Pendapatan Daerah			

4	16	17	2	Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi	Kota	Tersedianya Laporan Akhir Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagai dasar pemungutan retribusi	1 dokumen laporan akhir kajian perhitungan retribusi	500.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		IKM mengenai pelayanan prima kehumasan SKPD pemkot bekasi	75%					
4	16	15	1	Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi dan Telepon	Kota	Tersedianya jaringan telepon Tersedianya faksimili	30 Faximili dan 30 pemasangan jaringan telepon	96.257.000	Pendapatan Daerah			
4	16	15	10	Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi	Kota	Tersedianya DED Jaringan Menara Telekomunikasi dan Pergelaran FO (Fiber Optik) di Kota Bekasi	1 dokumen	700.000.000	Pendapatan Daerah			

4	16	15	11	Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota	Tersedianya menara repeater, Tersedianya Radio Repeater dan peralatan telekomunikasi yang handal dalam kegiatan operasional dilapangan	1 unit menara repeater, 1 unit readio repater	150.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	15	2	Sosialisasi Publikasi Pemilu	Kota	Tersedianya informasi tentang pelaksanaan pemilu	185 rim brosur, 500 buah sticker, 2 album, 180 buah foto, 1 kali event radio, 36 kali spot ILM, 2 kali advetorial, 12 kali talkshow, 18 buah spanduk, 7 buah baliho	150.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	15	5	Penguatan Fungsi PPID	Kota	Terlaksananya koordinasi Tersedianya buku hasil sengketa informasi	46 SKPD dan laporan tahunan	300.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	15	6	Pembinaan Kehumasan	Kota	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti pembinaan	85 anggota bakohumas, 1 kegiatan bakohumas nasional, 4 kegiatan forum bakohumas, 1 kegiatan pekan informasi nasional	166.000.000	Pendapatan Daerah			

4	16	15	7	Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan	Kota	Terselenggaranya pelatihan Citizen Journalism	1 kali pelatihan Citizen Journalism	150.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	15	8	Penerbitan Majalah Kota Bekasi	Kota	Tersedianya majalah Kota Bekasi	3 edisi majalah, 3000 eksemplar	148.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	15	9	Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017	SKPD	Pengelolaan, Penataan dan Sarana pendukung Media Centre dan Kliping Surat Kabar	1 tahun pengelolaan media center, 2 komputer, 3 printer, 2 meja komputer dan 110 buku kliping beritas	200.000.000	Pendapatan Daerah			
4	16	16		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan	100%					
4	16	16	1	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Kota	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Melalui media elektronik, radio dan media antar ruang	76 kali iklan layanan masyarakat, 76 kali talkshow, 8 kali live event, 30 spanduk, 48 baliho, 2 kali penyebarluasan informasi melalui TV, 1 kali pertunjukan rakyat, 1 kali kelompok informasi masyarakat	1.413.300.000	Pendapatan Daerah			
TOTAL								14.541.395.000				0

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Tahun 2017 disusun sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra DISKOMINFOSTANDI Tahun 2013-2018. Renja DISKOMINFOSTANDI berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika.

Renja DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi tahun 2017 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Tahun 2017 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DISKOMINFOSTANDI.

Diharapkan semua elemen kelembagaan DISKOMINFOSTANDI dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bekasi, 2017
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Bekasi

TTD & CAP

Dr. dr. Hj Titi Masrifahati, MKM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650214 199103 2 005

